

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan suatu proses penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai studi literatur atau studi kepustakaan yang diarahkan untuk menemukan landasan teori yang akurat dan terpercaya. Kajian pustaka juga berisikan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti, dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia (Sugiyono, 2016:291).

2.1.1 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu perekonomian suatu negara salah satunya adalah Indonesia. Indonesia telah beberapa kali menghadapi masalah inflasi dan nyaris membangkrutkan perekonomian nasional. Perhatian pemerintah terhadap inflasi dengan segala masalahnya sejak era reformasi dan desentralisasi tidak lagi menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia saja. Pemerintah dan Bank Indonesia kini telah membentuk Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada bulan juli 2011 dibentuk kelompok kerja nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran

TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID ini adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kementrian Dalam Negeri, dan menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Lucky Bayu Purnomo (2018:56) Inflasi adalah sebagai berikut:

“Inflasi merupakan keadaan dimana perekonomian disebuah negara terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang. Penyebab terjadinya karena ketidakseimbangan arus uang dan barang, kenaikan ini bersifat sementara. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan”.

Menurut Widjajanta dan Widyaningsih (2017:112) Inflasi adalah sebagai berikut :

“Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun”.

Definisi Inflasi menurut Untoro & Tim Guru Indonesia (2015:17) adalah sebagai berikut :

“Inflasi merupakan banyaknya jumlah uang (kertas) yang beredar sehingga nilai mata uang menjadi turun dan terjadi kenaikan harga-harga barang”.

Sedangkan definisi Inflasi menurut Cowt Hrey dalam Pasaribu (2015:21) adalah sebagai berikut :

“Inflasi merupakan suatu keadaan dari nilai uang turun terus menerus dan harga naik terus menerus”.

Dan definisi Inflasi menurut Sukwiaty, dkk (2014) adalah sebagai berikut :

“Inflasi merupakan suatu proses atau kejadian yang tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi berlangsung apabila proses kenaikan harga berjalan secara terus menerus serta saling mempengaruhi”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas maka dapat dikatakan bahwa Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa yang berlangsung secara terus menerus dan saling berhubungan, bukan dilihat dari tinggi rendahnya tingkat harga. Dan tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu inflasi juga tinggi jika terjadi tidak terus menerus.

2.1.1.1 Jenis Inflasi

Menurut Sukirno (2015:333), penyebab terjadinya inflasi dibagi tiga jenis sebagai berikut :

1. Inflasi Tarikan Permintaan, Inflasi ini biasa terjadi pada perekonomian berkembang dengan pesat, kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Disamping dalam perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus.
2. Inflasi Desakan Biaya, Inflasi jenis ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran gaji yang tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi

meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga berbagai barang.

3. Inflasi Diimpor, Inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

2.1.1.2 Indikator Inflasi

Menurut Syahwier (2017:508) Indikator Inflasi yang paling umum adalah sebagai berikut :

“Consumer Price Index (CPI) yang mengukur rata-rata perubahan harga yang dibayarkan oleh konsumen (dalam rata-rata) untuk sekelompok barang dan jasa tertentu. CPI merupakan indikator inflasi yang paling umum digunakan dan dianggap juga sebagai indikator keefektifan kebijakan pemerintah. Naiknya CPI mengindikasikan naiknya tingkat inflasi yang akan menyebabkan turunnya harga obligasi dan naiknya tingkat suku bunga”.

Cara menghitung rata-rata perubahan harga adalah sebagai berikut :

$$\text{Laju Inflasi} = \frac{\text{Indeks Harga Konsumen} - \text{Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya}}{\text{Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Rumus tersebut diatas digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini.

2.1.2 Nilai Tukar Rupiah

Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia, dikeluarkan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Rupiah telah mengalami inflasi tinggi selama sebagian besar keberadaannya. Pada periode oktober 1946 hingga maret 1950 mata uang Indonesia tidak memiliki pengakuan Internasional dan nilainya ditentukan dipasar gelap. Nilai tukar yang ditentukan saat kemerdekaan pada tahun 1949 adalah 3,8 rupiah hingga US \$1. Nilai tukar menunjukkan seberapa

banyak rupiah yang akan digunakan untuk dipersamakan dengan mata uang negara asing. Saat ini nilai mata uang negara Indonesia terhadap dolar AS melemah 167 poin atau 1,04 % ke level Rp 16.337 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi ditengah pergerakan mata uang Asia yang cenderung bervariasi. Adapun indeks dolar AS terpantau naik 0,41% menjadi 98,776. Dan menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

Definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Adiningsih, dkk (2017:60) adalah sebagai berikut :

“Nilai Tukar Rupiah merupakan harga rupiah terhadap mata uang negara lain”.

Definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Ismanthono (2015:154) adalah sebagai berikut :

“Nilai tukar rupiah merupakan nilai penukaran uang antara suatu valuta dengan valuta lainnya yang dibedakan antara kurs beli (*bid/buying rate*) dengan kurs jual (*offer/selling rate*)”.

Sedangkan definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Wardana (2017:239) adalah sebagai berikut :

“Nilai tukar rupiah merupakan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah”.

Dan definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Sukirno (2015:397) adalah sebagai berikut :

“Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lainnya”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas maka dapat dikatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditransaksikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya dan nilai tukar rupiah merupakan nilai tukar mata uang negara terhadap mata uang asing yang dibedakan antara kurs beli dengan kurs jual.

2.1.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Menurut Hamdy Hady (2015:46-53) faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dibagi tujuh faktor sebagai tersebut :

1. *Supply dan Demand Foreign Currency*. Valas atau *forex* sebagai benda ekonomi yang mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau *forex market*. Sumber-sumber penawaran atau *supply* valas tersebut adalah ekspor barang dan jasa, impor modal dan transfer valas lainnya, sedangkan sumber-sumber permintaan atau *demand* valas tersebut adalah impor barang dan jasa, ekspor modal dan transfer valas lainnya. Sesuai dengan teori mekanisme pasar, setiap perubahan permintaan dan penawaran valas yang terjadi di bursa valas tentu akan mengubah harga atau nilai valas tersebut yang ditunjukkan oleh *kurs* valas atau *forex rate*.
2. Posisi *Balane Of Payment* (BOP). *Balance Of Payment* atau neraca pembayaran Internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan

penduduk luar negeri untuk satu periode tertentu biasanya satu tahun periode.

3. Tingkat Inflasi. Pada keadaan semula kurs valas atau *forex* Rp/USD adalah sebesar Rp 4.500 per USD diasumsikan inflasi di USA meningkat cukup tinggi (misalnya 5%), sedangkan inflasi di Indonesia relatif stabil (hanya 1%) dan barang-barang yang di jual di Indonesia dan USA relatif sama dan saling mengsubstitusi. Dalam keadaan demikian harga barang-barang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari jepang akan meningkat. Impor USA yang meningkat ini akan mengakibatkan permintaan terhadap Rp meningkat pula.
4. Tingkat Bunga. Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas baik itu positif maupun negatif.
5. Tingkat Pendapatan. Faktor ke lima yang dapat mempengaruhi kurs valas atau *forex rate* adalah tingkat pendapatan masyarakat di suatu negara. Seandainya kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat, peningkatan impor ini akan membawa efek kepada demand valas yang pada gilirannya akan mempengaruhi kurs valas.
6. Pengawasan pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valas atau *forex rate*.
7. Ekspektasi dan Spekulasi/Isu/Rumor. Adanya harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit BOT-USA menurun atau sebaliknya juga dapat mempengaruhi kurs valas USD. Adanya spekulasi atau isu devaluasi Rupiah karena defisit *current account* yang besar juga berpengaruh kepada kurs valas dimana valas secara umum mengalami apresiasi.

2.1.2.2 Indikator Nilai Tukar Rupiah

Menurut Arifin (2014:4) Indikator Nilai Tukar Rupiah adalah sebagai berikut:

“Tanda-tanda krisis mulai nampak pada bulan juli 1997, menyusul terjadinya gejolak nilai tukar yang meruntuhkan perekonomian Thailand. Mata uang regional mulai mengalami tekanan depresiatif dan terus bergejolak sebagai pertanda awal terjadinya efek menular (*contagian effect*)”.

Faktor pemicu gejolak tersebut secara garis besar dapat dilihat dari dua sisi, sisi permintaan dan penawaran.

$$Y = \frac{a + b}{2}$$

Rumus diatas digunakan menjadi indikator dalam penelitian ini.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dan dikenakan pada setiap jalur/rantai produksi dan distribusi. Akan tetapi, pengenaan PPN tidak menimbulkan pajak berganda, karena salah satu karakteristik PPN adalah menganut *Indirect Substation Method/Invoice Method*, yaitu pajak yang terutang dihitung dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK). Dan menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

Definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:235) adalah sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. PPN bersifat netral, dibentuk oleh faktor PPN dikarenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta faktor dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan”.

Definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Pohan (2016:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Sedangkan definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Sukardji Untung (2014:29) adalah sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat seperti mata rantai di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Dan definisi Nilai Tukar Rupiah menurut Waluyo (2014:9) adalah sebagai berikut :

“Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”.

Dapat dikatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri di dalam daerah pabean, PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri.

2.1.3.1 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Bayu Kaniskha (2016) mengemukakan Indikator Pajak Pertambahan Nilai adalah :

“Salah satu reformasi yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah adalah reformasi di bidang ekonomi khususnya perpajakan, reformasi

perpajakan perlu dilakukan karena kapabilitas organisasi dalam melakukan pemungutan pajak semakin menurun”.

Dapat dilihat dari 2 indikator, yaitu trend penurunan terakhir dan target penerimaan tidak sesuai target sejak tahun 2008. Kenaikan tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 70% bahan baku produksi Indonesia masih mengandalkan impor, jika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah mengakibatkan lebih banyak jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu dollar. Maka harga bahan baku produksi impor yang harus dibayar Indonesia menjadi lebih mahal, harga jual barang dan jasa yang mengalami peningkatan di masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan daya konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pula terhadap penurunan penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan salah satu cara yang dilakukan adalah pembangunan diberbagai sektor kehidupan, apabila laju inflasi tidak dapat dikendalikan maka harga saham di pasar modal pun akan turun. Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya sekeranjang pasar dari barang dan jasa konsumen yang dikaitkan dengan biaya sekeranjang pasar dari barang dan jasa tersebut pada tahun dasar tertentu. Dimana inflasi terjadi dengan naiknya harga-harga seluruh kebutuhan yang terus menerus, akan pengaruh inflasi terhadap aktivitas di pasar modal, laju inflasi di indonesia termasuk signifikan tentunya dengan berbagai faktor, inflasi mengacu pada kenaikan harga yang

menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Nilai tukar juga dapat menyebabkan inflasi, karena pemerintah akan harus berurusan dengan perbedaan dalam impor/tingkat ekspor. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap mata uang negara asing akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) karena, semakin tingginya laju inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan berdampak kepada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Pada keadaan semula kurs valas atau *forex* Rp/USD adalah sebesar Rp 4.500 per USD diasumsikan inflasi di USA meningkat cukup tinggi (misalnya 5%), sedangkan inflasi di Indonesia relatif stabil (hanya 1%) dan barang-barang yang di jual di Indonesia dan USA relatif sama dan saling mengsubstitusi. Dalam keadaan demikian harga barang-barang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari jepang akan meningkat. Impor USA yang meningkat ini akan mengakibatkan permintaan terhadap rupiah juga meningkat.

2.2.1 Keterkaitan Inflasi terhadap PPN

Menurut Nersiwad (2012) menyatakan bahwa:

“Kendala yang banyak dialami oleh berbagai negara dalam perekonomian adalah masalah inflasi, terlebih jika yang terjadi tingkat inflasi tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, impor/ekspor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi itu berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi”.

Menurut Nuraeni (2017:15), dalam penelitian Warnita, Fauziati, dan Yulistia (2016) menyatakan bahwa:

“Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN, menyatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi harga BKP dan/atau JKP, dimana dasar pengenaan PPN merupakan harga perolehan dari BKP dan/atau JKP. Tarif yang dikenakan terhadap PPN yaitu sebesar 10% dari harga perolehan. Hal tersebut membuat inflasi mempengaruhi penerimaan PPN”.

Dan menurut Abdul Jabar Yoesoef (2015:60), menyatakan bahwa:

“Penggunaan sistem *self assessment* menurut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Di lain pihak ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi”.

Berdasarkan premis-premis diatas dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama penelitian (H1) ini adalah Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena jika terjadi kenaikan tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Terjadinya kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa juga akan meningkat yang berarti DPP PPN juga meningkat. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan PPN yang juga akan meningkat.

2.2.2 Keterkaitan antara Nilai Tukar Rupiah terhadap PPN

Menurut Nuraeni (2017) menyatakan bahwa:

“Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi

penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN”.

Menurut Sukardji Untung (2014:99) menyatakan bahwa:

“Nilai tukar (exchange rate) atau disebut juga kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain”.

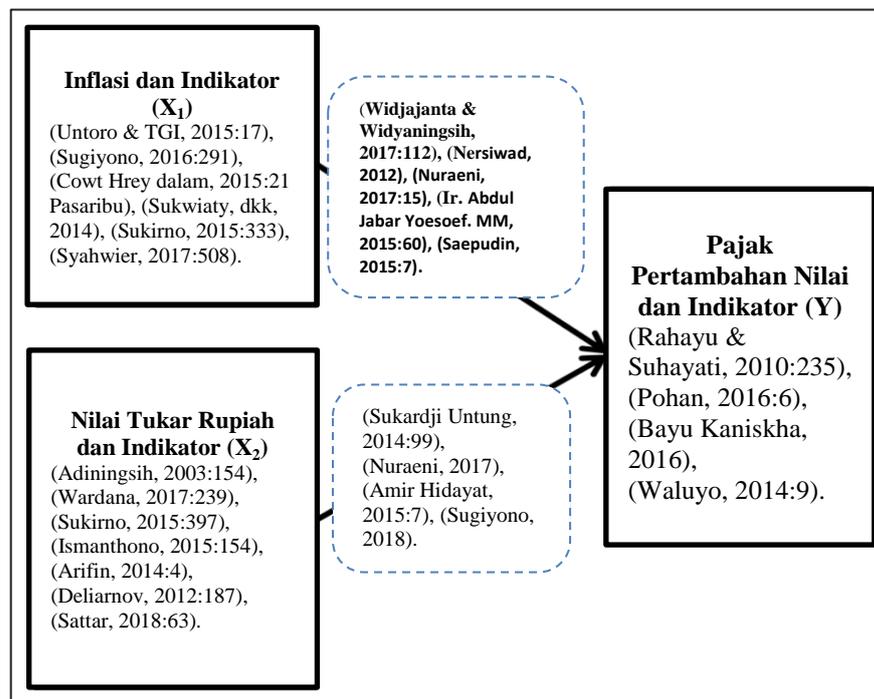
Sedangkan menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa:

“Bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara negatif dan signifikan”.

Membuktikan bahwa hipotesis H2 yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan premis-premis diatas dapat dirumuskan bahwa hipotesis kedua penelitian (H2) ini adalah Nilai Tukar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka gambar paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Definisi Hipotesis menurut Sugiyono (2012:99) adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan definisi diatas, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis sementara bahwa:

H1 : Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

H2 : Nilai Tukar Mata Uang berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai.